

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN DESA WISATA DI KABUPATEN BOGOR

Nining Latianingsih<sup>1</sup>, Titik purwinarti<sup>2</sup>, Narulita Syarweni<sup>3</sup>, Risya Zahrotul Firdaus<sup>4</sup>

Politeknik Negeri Jakarta , Depok, Indonesia ([nining.latianingsih@bisnis.pnj.ac.id](mailto:nining.latianingsih@bisnis.pnj.ac.id))<sup>2</sup>

Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia ([titik.purwinarti@bisnis.pnj.ac.id](mailto:titik.purwinarti@bisnis.pnj.ac.id))<sup>2</sup>

Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia ([Narulita.syarweni@bisnis.pnj.ac.id](mailto:Narulita.syarweni@bisnis.pnj.ac.id))<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia ([Risya.zahrotul@bisnis.pnj.ac.id](mailto:Risya.zahrotul@bisnis.pnj.ac.id))<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT:** *This study aims to see the application of labor law in the development of tourist villages in Bogor Regency. The implementation of labor laws in tourist villages in Bogor Regency is important to ensure the protection of workers' rights in the tourism sector. So it is necessary to conduct an analysis of how labor laws are applied and complied with in the tourist village. The application of labor laws can help ensure that workers in the tourism sector receive the protection they receive in accordance with applicable regulations. With a focus on community empowerment through tourism villages, this study will analyze the role of labor law in improving the welfare and participation of local communities. Through a qualitative approach and field studies, this research will provide in-depth insights into how labor law can be an effective instrument in supporting the development of tourism villages. This research will explore how the implementation of labor regulations such as minimum wage and working hours can affect the development of tourist villages in Bogor Regency. By engaging local stakeholders, the study will also evaluate*

**Keywords:** *tourism village, effectiveness of employment policy, community participation, Bogor district, community welfare*

**ABSTRAK :** Penelitian ini mempunyai tujuan bagaimana penerapan mengenai hukum ketenagakerjaan dalam meningkatkan serta mengembangkan desa wisata di wilayah Kabupaten Bogor. Implementasi hukum ketenagakerjaan dalam lingkup desa wisata di Kabupaten Bogor merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja di sektor pariwisata. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana hukum ketenagakerjaan diterapkan dan dipatuhi di desa wisata tersebut. Penerapan hukum ketenagakerjaan dapat membantu memastikan bahwa pekerja pada sektor pariwisata mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan fokus pada pengembangan serta peningkatan kemampuan dalam memberdayakan masyarakat pada desa wisata di kabupaten Bogor. Dalam melaksanakan penelitian ini akan mencoba membuat analisis mengenai peran hukum ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan, penelitian ini akan mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai implementasi hukum ketenagakerjaan menjadikan instrument secara efektif dalam rangka mendukung pembangunan desa wisata berkelanjutan serta mandiri. Penelitian ini akan menggali bagaimana penerapan peraturan ketenagakerjaan seperti upah minimum dan jam kerja dapat mempengaruhi pembangunan desa wisata di Kabupaten Bogor. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan lokal, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas kebijakan

ketenagakerjaan dalam menciptakan kesinambungan yang berkelanjutan bagi desa wisata. Hasil dari kegiatan penelitian ini akan memberikan hasil yang konkret untuk pemerintah daerah dan pengelola desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian dari hasil penelitian ini juga peneliti berharap akan memberikan kebermanfaatannya dalam mengembangkan baik teori serta pengetahuan mengenai hubungan antara hukum ketenagakerjaan dan pembangunan desa wisata di Indonesia.

**Keywords:** *desa wisata , efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, partisipasi Masyarakat, kabupaten Bogor , kesejahteraan masyarakat*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pada setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai pertumbuhan serta perkembangan yang berbeda, terutama pada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan daerah lain ( Paramitha, dkk: 2020). Desa Wisata sebagai tujuan destinasi wisatawan untuk mengimplikasi pesona tersendiri mengenai daya Tarik, infrastruktur serta fasilitas dan aksesibilitas yang menyatu dengan kebiasaan yang ada di Masyarakat itu sendiri (simanungkalit et.al: 2019). Keberadaan Desa wisata di kabupaten Bogor, berkembang pesat sekali, awalnya pada tahun 2020 jumlah desa wisata pada tahun 2019 ada 17 desa wisata, dan pada tahun 2024 pertengahan berjumlah hampir empat kali lipat, yaitu sejumlah 70 Desa wisata (asosiasi Desa wisata kabupaten Bogor : 2024). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab efektivitas kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Bogor. Desa wisata merupakan suatu strategi pengembangan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat setempat . Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya kebijakan ketenagakerjaan yang efektif. Kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dukungan Masyarakat diperlukan dan sebagai salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kesejahteraan Masyarakat, sehingga dalam Penelitian ini dapat menggunakan salah satu metode kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Untuk data yang akan digunakan adalah pertama data primer dan kedua data sekunder yang di peroleh dari kegiatan survei serta wawancara yang dilakukan kepada Masyarakat, tokoh Masyarakat, serta dinas kebudayaan dan pariwisata di kabupaten Bogor , Adapun mengenai Analisis datanya akan dilaksanakan dengan menggunakan analisa tema serta analisa konten.

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat memberikan rekomendasi serta kontribusi pada pemerintah daerah serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor. Selain itu hasil penelitian ini juga, dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Peraturan kebijakan mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja , dan dalam Undang-undang ini ada beberapa jenis perubahan yang sangat membedakan khususnya yang berkaitan dengan Norma Hukum ketenagakerjaan yang meliputi

peraturan PKWT, Penggunaan TKA, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK, dan sanksi administrative serta pidana. Pada saat ini ada dua peraturan hukum ketenaga kerjaan yang belaku di Indoneisa yaitu UU no 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan serta UU no 6 tahun 2023 mengenai penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja menjadi UU, atau juga disebut UU cipta Kerja 2023.

Desa wisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan industri pariwisata, seperti pengembangan akomodasi, kuliner, dan fasilitas rekreasi. Selain itu, desa wisata juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya kebijakan ketenagakerjaan yang efektif. Kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dimana merupakan bagian dari faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan memiliki pengaruh yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mempunyai Tujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan desa wisata di Kabupaten Bogor. Selain itu dalam penelitian ini juga untuk menjawab pertanyaan yang muncul di lapangan yaitu: 1) sejauhmana efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor 2) bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Bogor 3) serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat?

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kontribusi kepada pemerintah daerah khususnya dan masyarakat sebagai Upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor. Selanjutnya dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka teoritis yaitu menelaah literatur yang merupakan menelaah kajian literatur untuk menjadi landasan logis dalam mengembangkah hipotesis atau proposisi mengena isi dari penelitian serta model penelitian apabila diperlukan. Dimana bagian ini berasal dari teori, kerangka konseptual, jurnal terdahulu serta hipotesis dari penelitian yang akan dilaksanakan. Peningkatan kesejahteraan serta kualitas Masyarakat dalam rangka menerapkan pariwisata berkelanjutan melalui pengalaman wisatawan adalah hal yang sangat penting dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan. (ilham Juanaid dkk: 2022)

Pariwisata berkelanjutan bisa memberikan kebermanfaatn untuk masyarakat local, sehingga definisi, konsep ataupun indicator dari pariwisata berkelanjutan dapat menjadi pemahasan di dunia kampus. (Demolingo et al., 2020)

Definisi Desa Wisata menurut (pedoman Kabupaten Bogor: 2024) adalah kawasan yang memiliki potensi wisata baik alam, dan keunikan daya Tarik wisata yang khas yaitu wisatawan akan merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi Masyarakat di Pedesaan dengan segala potensinya. Sedangkan Desa wisata dan pariwisata berkelanjutan terkait dengan lingkungan yang

menjadi lokasi wisata, kondisi sosial budaya masyarakat dan aspek ekonomi yang akan dihasilkan dari kegiatan pariwisata. Interaksi dari berbagai manusia dalam lingkungan desa atau pedesaan menggambarkan adanya hubungan antara manusia yang berwisata dan desa yang menjadi tujuan wisatawan. bentuk kepariwisataan. Interaksi yang terbangun tersebut menggambarkan kaitan antara desa, wisata dan prinsip berkelanjutan (Abdullah et al., 2021; Dilwan et al., 2019; Mustafa et al., 2018)

Peraturan daerah kabupaten Bogor No 4 tahun 2007 tentang pengelolaan usaha pariwisata, yang mengatur mengenai ketentuan umum, prinsip-prinsip pengelolaan usaha pariwisata, pengelolaan usaha pariwisata, perizinan, peran serta Masyarakat, pembiasaan pengendalian dan pengawasan, penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ketentuan umum pasal 1 no 8 menyebutkan bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya Tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dalam bidang tersebut. Sedangkan usaha jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, usaha jasa pramuwisata dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata.

Melihat Peraturan daerah No 4 tahun 2007, memungkinkan ada hubungannya dengan hukum ketenagakerjaan, dikarena disana ada kegiatan usaha pariwisata yang kegiatan itu dilakukan oleh tenaga kerja, pada beberapa kegiatan usaha, baik itu bidang akomodasi, usaha penyediaan makan dan minum, penyediaan angkutan wisata, usaha penyediaan sarana wisata dan Kawasan pariwisata.

Pada prinsip pengelolaan usaha pariwisata seperti yang diatur pada pasal 2 Perda no 4 tahun 2007 disebutkan bahwa pengelolaan usaha pariwisata termasuk didalamnya desa wisata, diarahkan untuk terwujudnya tertib administrasi, kepastian hukum, pengembangan investasi, memperluas lapangan kerja dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

Sumber daya manusia dipresentasikan sebagai sesuatu yang mempunyai potensi, kualitas, dan keterampilan (Maya sajidah dan Agus Machfud : 2021). Setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban menentukan tujuan dan strategi yang sesuai untuk mewujudkan harapan yang telah disusun sebelumnya.

## **METODE RISET**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiono: 2018) dengan tipe penelitian deskriptif. Artinya data atau fakta yang dihimpun berbentuk teks, kata atau menggambarkan daripada angka atau statistic seperti pada penelitian kuantitatif.

Menurut Satori & Komariah (2017, hlm. 26) karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut memiliki latar belakang alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrument kuncinya, bersifat deskriptif, bekerja dengan focus pada proses dan hasil merupakan keniscayaan, cara analisis data dilakukan secara induktif, menjadikan makna sebagai hal yang esensial, focus studi sebagai batasan penelitian, desain awalnya bersifat tentative dan verifikatif serta penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari survei , wawancara dan FGD dengan tokoh masyarakat , ketua desa wisata, dinas pariwisata serta Pemerintah daerah bagian perundang-undangan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan hasil dari kajian dan analisis

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

**Nining Latianingsih<sup>1</sup>, Titik purwinarti<sup>2</sup>, Narulita Syarweni<sup>3</sup>, Risyah Zahrotul Firdaus<sup>4</sup>)  
Efektivitas Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk  
Mengembangkan Desa Wisata Di Kabupaten Bogor**

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas kurang lebih 298.838,304Ha, secara geografis terletak di antara 6.18'0" – 6.47'10" Lintang Selatan dan 106.23'45" – 107.13'30" Bujur Timur. Secara administrative, Kabupaten Bogor terdiri dari 416 Desa dan 19 Kelurahan (435 desa dan kelurahan), 3.768RW dan 14.951 RT yang tercakup dalam 40 Kecamatan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor: 2024)

Gb 1. Kabupaten Bogor



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2024

Gb 2. Batas Administrasi kabupaten Bogor



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya untuk memajukan sektor pariwisata, salah satunya adalah dengan memperbanyak desa wisata melalui program Karsa Bogor Maju. Dan desa wisata menjadi tren di kabupaten Bogor, tren tersebut memang merupakan target dari pemerintah kabupaten Bogor sebagai suatu Upaya dalam menggairahkan roda perekonomian Masyarakat desa. Salah satu Upaya yang dilakukan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Bogor yaitu menggelar

**Nining Latianingsih<sup>1</sup>, Titik purwinarti<sup>2</sup>, Narulita Syarweni<sup>3</sup>, Risy Zahrotul Firdaus<sup>4</sup>)**  
**Efektivitas Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengembangkan Desa Wisata Di Kabupaten Bogor**

Anugrah wisata desa, dengan total hadiah 1,3M sebagai ajang apresiasi bagi desa wisata yang berprestasi, sehingga harus dikelola dan membuat tambah keren, dengan berbagai potensi desa wisata berupa objek dan daya tarik wisata, tata hidup keseharian masyarakat desa, adat istiadat, seni budaya dan sumber daya manusianya untuk di berdayakan. (Republika : 2022)

Pengembangan desa wisata dilakukan dengan Upaya menjaga kelestarian alam yang ada serta meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan. Pembedayaan desa wisata mulai diprogramkan oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata daerah Kabupaten bogor dimulai sejak tahun 2009 hingga hari ini tahun 2024, Dimana pengelolaan desa wisata sudah mulai menjadi tren, sehingga dapat berjalan dinamis, terbentuk secara swadaya oleh Masyarakat, kemudian didampingi dan diberikan pelatihan-pelatihan oleh disbudpar kabupaten Bogor, berdasarkan wawancara dengan asosiasi desa wisata kabupaten Bogor. Pelaksanaan pendampingan yang dimulai sejak tahun 2009 diberikan secara rutin yaitu menggunakan konsep pembekalan berupa bagaimana tata Kelola destinasi, konsesp desa wisata, tata Kelola sumber daya manusia di desa, sehingga beralku sampai sekarang dan menumbuhkan mindset mereka terbangun sehingga Masyarakat desa wisata akan menjaga dengan sebaik-baiknya.

Tabel 1. Berbagai Potensi pendukung wisata Kabupaten Bogor

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Akomodasi	➤ 300	
2	Restoran dan Rumah makan	➤ 500	
3	Daya Tarik wisata	➤ 150	
4	Desa wisata	70	
5	Sangganr seni dan Budaya	➤ 100	
6	Wisatawan di tahun 2023	12.7 Juta	

Sumber : dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor, tahun 2024

Gb. 3. Kunjungan Wisatawan tahun 2023

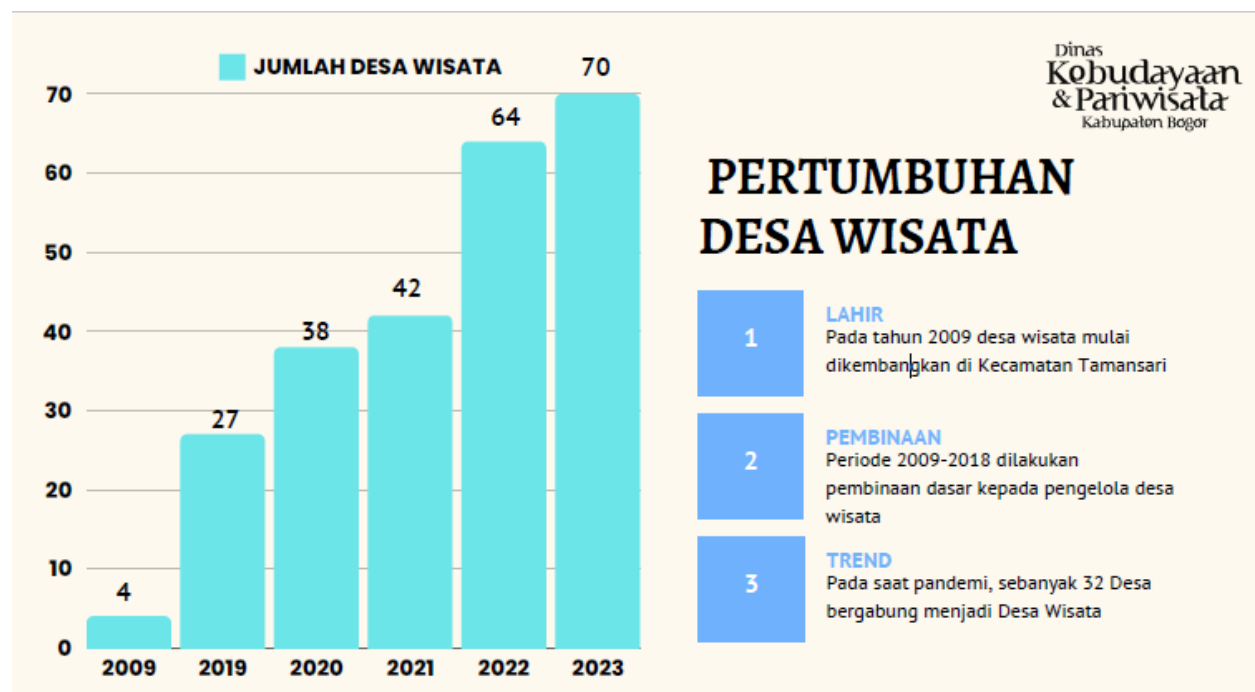


Sumber : dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor, tahun 2024

Pengembangan Desa wisata di kabupaten Bogor sangat pesat sekali dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

Desa wisata mempunyai potensi sumber daya manusia yaitu melalui POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), perkumpulan ibu-ibu PKK, dan Karang Taruna yang mengelola potensi desa wisata dengan sumber daya alamnya yang indah . Berdasarkan keterangan kepala asosiasi desa wisata, abas Helmy, menyebutkan bahwa SDM pariwisata atau yang tergabung pada Pokdarwis, sampai saat ini pada Sebagian besar desa wisata, belum ditentukan honorinya berdasarkan UMR kabupaten Bogor, akan tetapi berdasarkan setiap event yang diadakan. Memang ada beberapa desa wisata khususnya yang sudah kategori mandiri, sudah mulai disesuaikan dengan upah berdasarkan UMR, diantaranya adalah Desa wisata Tugu Utara. Kebanyakan dalam memperoleh penghasilan biasanya dilaksanakan oleh kelompok Ibu PKK telah menciptakan olahan dari berbagai makanan untuk disajikan kepada wisatawan baik local maupun internasional, seperti Ranginang rangining, minuman dan makanan khas Desa wisata masing-masing.

Gb 4 Pertumbuhan Desa wisata di Kabupaten Bogor sampai tahun 2023



Sumber : Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Bogor, tahun 2024

Melihat pertumbuhan desa wisata di Kabupaten Bogor yang tumbuh dengan cepat dan pesat, tentunya ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Khususnya dihubungkan dengan Hukum Ketenagakerjaan, tentunya, pelaksanaannya harus sudah melaksanakan Hukum ketenagakerjaan, akan tetapi dengan wawancara Bersama ketua Asosiasi Desa wisata bapak Abas Helmy menyebutkan baru bisa dilaksanakan di pada Kategori Desa wisata maju yang jumlahnya masih kecil yaitu sekitat 3.1% di kabupaten Bogor, sedangkan kategori berkembang 18.8% dan Rintisan yang paling banyak 78.1% berdasarkan data dari Disbudpar. Pelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan hanya pada kategori desa wisata maju, yaitu desa wisata yang sudah menggunakan dan menerapkan system ticketing sehingga dapat memberikan pemasukkan dari wisata harian, jadi pemasukannya sudah pasti ada setiap bulan,

salah satu contoh dari desa wisata maju adalah desa wisata Tugu Utara di daerah Cisarua Puncak kabupaten Bogor.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Keberadaan Desa wisata sangat mempengaruhi kondisi Masyarakat yang ada dilokasi desa wisata, tergantung kategori desa wisata. Di Kabupaten Bogor kategori desa wisata terbagi kedalam tiga kategori, yaitu desa wisata dengan kategori maju (3.1%), kategori berkembang (18.8%) dan Kategori Rintisan (78.1%).

Pelaksanaan Hukum Ketengakerjaan di Kabupaten Bogor, baru bisa terlaksanan pada desa wisata kategori Maju, karena desawisatanya sudah berjalan dengan baik, ada pemasukan tetap dari penjualan ticket dan pelaksanaannya setiap hari selalu ada kunjungan dari wisatawan, baik individu maupun yang di Kelola oleh perjalanan wisata atau agen wisata. Sehingga disini perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

## **CATATAN AKHIR**

ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Politeknik Negeri Jakarta melalui Pusat penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, yang telah memberikan dana penelitian dengan Skema PAGB, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
2. Jurusan Administrasi Niaga PNJ, yang sudah memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan ini.
3. Tim Peneliti yang sudah berkenan melaksanakan dan mengadakan penelitian ini dengan baik .

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, N., Syam, N., & Surur, F. (2021). Analisis Interaksi Keruangan dalam Mendukung Optimalisasi Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 5(1), 55-64. doi:10.24912/jmstkik.v5i1.7761

Assosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor. 2024. FGD FGD Pengembangan Desa Wisata kabupaten Bogor. Penelitian PAGB PNJ tahun 2024.

Ilham Junaidi dkk. 2022. Pengembangan Desa Wisata berkelalnjutan : studi kasus di desa paccekke Kabupaten Baru Indonesia . *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)* Oktober 2022, 6 (3): 287-301 289

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bogor: 2024. FGD Pengembangan Desa Wisata kabupaten Bogor. Penelitian PAGB PNJ tahun 2024.

Maya sajidah dan Agus Machfud . 2021. *Jurnal Pariwisata Terapan* vol 5 No 1 tahun 2021. [https:// Jurnal.ugm.ac.id](https://Jurnal.ugm.ac.id) diakses tanggal 29 Juli 2024.

Paramitha, O. D., Kagungan, D., & Mulyana, N. (2020). Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten



**Nining Latianingsih<sup>1</sup>, Titik purwinarti<sup>2</sup>, Narulita Syarweni<sup>3</sup>, Risyah Zahrotul Firdaus<sup>4</sup>)  
Efektivitas Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk  
Mengembangkan Desa Wisata Di Kabupaten Bogor**

Tanggamus. Administrasi, 2(1).

Republika . 2022. Desa Wisata Menjamur di Kabupaten Bogor, Tambah 15 dalam Setahun.

<https://news.republika.co.id/berita/rlwsb8382/desa-wisata-menjamur-di-kabupaten-bogor-tambah-15-dalam-setahun> , diakses tanggal 29 Juli 2024

Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed.1, Cetakan ke-7*. Bandung: Alfabeta

Simanungkalit, V. br., Sari, D. A., Teguh, F., Ristanto, H., Permanasari, I., Sambodo, L., ... Vitriani, D. (2019). *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau. (CrescentiaNovinti, Ed.)*. Jakarta Selatan: Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.